KUASA HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Tori Angin
Email: toriangan01@icloud.com
No BP: 2010003600056
Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Kuasa hukum adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab mendampingi pihak-pihak bersengketa untuk beracara di pengadilan. Pendampingan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dengan pihak terlibat dan tertuang dalam surat kuasa khusus. Kuasa Hukum dalam Prosedur Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat dalam PTUN adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 yang merumuskan bahwa "para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa kuasa", dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam beracara di PTUN tidak diwajibkan diwakili oleh Penerima Kuasa dan/atau advokat, sehingga Direksi dari suatu Perseroan Terbatas dapat beracara di PTUN. Semua pihak yang berperkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") dapat memilih apakah mereka akan didampingi kuasa hukum atau beracara sendiri.

Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung RI (hal. 825), selain memberikan kuasa kepada advokat, pemberian kuasa oleh penggugat dapat dilakukan sebagai berikut:

1. penggugat bisa memberikan kuasa insidentil dengan izin Ketua PTUN pada keluarga dengan dikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat, dan mampu beracara di pengadilan.

2. Biro Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum dan Fakultas Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat bertindak sebagai kuasa penggugat dalam perkara prodeo.

Sedangkan jika menjadi pihak tergugat, maka pihak tergugat dapat:

1. Memberikan surat kuasa pada advokat;
2. Memberikan surat tugas tanpa materai kepada Pejabat pada instansi pemerintahan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
3. Jaksa pengacara Negara dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara hanya dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah

B. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kuasa Hukum

Kuasa hukum adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab mendampingi pihak-pihak bersengketa untuk beracara di pengadilan. Pendampingan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dengan pihak terlibat dan tertuang dalam surat kuasa khusus. pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa; Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan surat kuasa sebagaimana diatur pada Pasal 1793 KUH Perdata, yang selengkapnya berbunyi: Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Pengadilan atau

Mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem common law, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.

Secara umum, masyarakat luas mengenal kuasa hukum dengan berbagai istilah, mulai dari pengacara, penasihat hukum, pembela atau konsultan hukum. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat), maka semua peristilahan bagi orang yang menjalankan profesi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi dan membela serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan kliennya baik di dalam maupun di luar Pengadilan, disebut sebagai orang yang menjalankan profesi Advokat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang dapat menjadi kuasa hukum di Pengadilan adalah orang yang berprofesi sebagai Advokat dan diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Advokat. Dimana salah satu persyaratan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah “tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara”. Oleh sebab itu, mengacu pada Undang-Undang Advokat seorang ASN tidak dimungkinkan untuk menjadi kuasa hukum dalam hal bertindak mewakili kepentingan pribadi orang lain atau klien di Pengadilan. Namun demikian, dalam hal tertentu seorang ASN bisa menerima dan menjalankan kuasa untuk beracara di pengadilan, contohnya : Jaksa sebagai ASN, dapat bertindak sebagai kuasa atau pengacara negara di Pengadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang

menyatakan bahwa “di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Selain Jaksa sebagaimana disebutkan diatas, ASN yang juga dapat bertindak sebagai kuasa untuk beracara di Pengadilan adalah orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat atau ditunjuk oleh instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan untuk mewakili institusinya baik dalam perkara Perdata maupun perkara Tata Usaha Negara dengan terlebih dahulu menunjukkan surat kuasa dan/atau surat tugas dari pimpinan/kepala institusinya.

2.2 Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) yang Anda sebutkan, pasal tersebut berbunyi lengkap sebagai berikut “Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.” Artinya adalah semua pihak yang berpekar pada PTUN dapat memilih apakah mereka akan didampingi kuasa hukum atau beracara sendiri. Menurut Adriaan W. Bedner dalam buku Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (hal. 137), hal ini

sesuai dengan prosedur hukum acara perdata yang diatur dalam Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad Tahun 1941 No. 44, yang tidak mewajibkan hal ini (harus diwakilkan oleh kuasa hukum)[3].Pertanyaan Anda adalah apakah kuasa hukum tersebut haruslah advokat yang mengantongi izin advokat?Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung RI (hal. 825-826), selain memberikan kuasa kepada advokat, pemberian kuasa oleh penggugat dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penggugat bisa memberikan kuasa insidentil dengan izin Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara pada keluarga dengan dikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat, dan mampu beracara dipengadilan.
2. Biro Bantuan Hukum (BBH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Fakultas Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat bertindak sebagai kuasa penggugat dalam perkara prodeo.

Lebih lanjut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung RI (hal. 826) menjelaskan bahwa jika menjadi pihak tergugat, maka pihak tergugat dapat:

1. Memberikan surat kuasa pada advokat;
2. Memberikan surat tugas tanpa materai kepada Pejabat pada instansi pemerintahan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
3. Jaksa pengacara Negara dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara hanya dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah.

Pemberian kuasa (lastgeving) yang terdapat dalam Pasal 1792 KUHPerdara itu mengandung unsur:

- Persetujuan.
- memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan
- atas nama pemberi kuasa.

Unsur persetujuan ini harus memenuhi syarat-syarat persetujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara:

- sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu hal tertentu.
- suatu sebab yang halal.

Unsur memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas. Unsur atas nama pemberi kuasa berarti bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa.

Beberapa contoh putusan nya:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 128/B/2013/PTTUN.MDN: Idrus Maulana Chatib, S.H. selaku Legal Officer yang menerima kuasa dari PT. Bank Mandiri, Tbk CBC Palembang yang berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi

2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 74/B/2012/PT.TUN.SBY: Mohamad Akbar, S.H., selaku Legal Officer, menerima kuasa dari Kepala Kantor Cabang Pacitan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Tergugat I)
3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 19/B/2015/PT.TUN.JKT: Agung Dewandono, S.H. dan Surya Irawan, S.H. selaku Legal Officer, menerima kuasa untuk mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk yang berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi.
4. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/B/2010/PT.TUN.JKT: Akhirul Anwar, S.H., Legal Officer Bagian Hukum, menerima kuasa dari Direktur Utama Perum Pegadaian selaku Tergugat.
5. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 165/B/2013/PT.TUN.JKT: Muhammad Fazri, S.H., selaku Legal Officer, menerima kuasa dari Ketua Stikes Sari Mulia Banjarmasin (Tergugat).

Dasar hukum:

1. Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad Tahun 1941 No. 44;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan:

1. *Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/B/2010/PT.TUN.JKT*
2. *Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 74/B/2012/PT.TUN.SBY*
3. *Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 165/B/2013/PT.TUN.JKT*
4. *Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 128/B/2013/PTTUN.MDN*
5. *Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 19/B/2015/PT.TUN.JKT*

C. PENUTUP

Kuasa hukum adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab mendampingi pihak-pihak bersengketa untuk beracara di pengadilan. Pendampingan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dengan pihak terlibat dan tertuang dalam surat kuasa khusus. Semua pihak yang berperkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) dapat memilih apakah mereka akan didampingi kuasa hukum atau beracara sendiri. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) yang Anda sebutkan, pasal tersebut berbunyi lengkap sebagai berikut: “Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh

seorang atau beberapa orang kuasa.” Artinya adalah semua pihak yang berpekara pada PTUN dapat memilih apakah mereka akan didampingi kuasa hukum atau beracara sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..